



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMRAN**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **401266**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.020.555.500
1. MOBIL, VOLVO EC210B PRIME EXCAVATOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 172.806.700		
2. MOBIL, VOLVO EC210B PRIME EXCAVATOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 172.806.700		
3. MOBIL, VOLVO EC210B PRIME EXCAVATOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 172.806.700		
4. MOBIL, VOLVO EC210B PRIME EXCAVATOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 172.806.700		
5. MOBIL, VOLVO EC210B PRIME EXCAVATOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 172.806.700		
6. LAINNYA, INGERSOL RAND / DOOSAN TOWER LAMP 1000 WATT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 52.174.000		
7. LAINNYA, INGERSOL RAND / DOOSAN TOWER LAMP 1000 WATT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 52.174.000		
8. LAINNYA, INGERSOL RAND / DOOSAN TOWER LAMP 1000 WATT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 52.174.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	197.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	161.991.873
F. HARTA LAINNYA	Rp.	75.000.000
Sub Total	Rp.	1.454.547.373



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.454.547.373

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.